



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Watampone, 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

H.A. SURYA DARMA, SE., M.Si
Pangkat Pembina Utama Madya
Nip.19600424 198702 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diuji.

Tahun 2018 merupakan tahun ke lima atau akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2013-2018. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Revisi Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone 2013-2018.

Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone periode 2013-2018 adalah “Terwujudnya Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.

Sedangkan Misinya :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

Berdasarkan keenam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, Sekretariat Daerah berupaya mendukung Misi yang ke empat, yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan”**.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator

sasaran terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 20 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 5 Indikator Sasaran
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 sebanyak 5 Indikator sasaran atau 100% kategori Baik Sekali (melebihi target)
2. Sasaran Strategis 2 dengan 3 Indikator Sasaran
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 sebanyak 1 indikator sasaran baik sekali (melebihi target) atau 33,33%, 2 indikator sasaran atau 66,67 % kategori baik.
3. Sasaran Strategis 3 dengan 4 Indikator Sasaran
Capaian Indikator Sasaran 4 sebanyak 2 Indikator sasaran atau 50% Baik sekali, 1 Indikator sasaran atau 25% kategori baik, 1 indikator sasaran kategori kurang atau 25%.
4. Sasaran Strategis 4 dengan 1 Indikator Sasaran
Capaian Indikator Sasaran sebanyak 1 Indikator sasaran atau 100% kategori Cukup.

Dari hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 13 (tigas belas) Indikator Kinerja, diketahui bahwa 8 indikator sasaran atau 61,54% kategori Baik Sekali, 3 indikator sasaran atau 23,08% kategori Baik, 1 Indikator sasaran atau 7,69% kategori cukup dan 1 indikator atau 7,69 % kategori kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 84,62%, berdasarkan skala pengukuran ordinal kondisi capaian ini berada pada interval realisasi kinerja 76%-100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yang bermakna Baik. Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018 dapat dikategorikan Baik

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.1.1. Visi	8
2.1.2. Misi	8
2.1.3. Tujuan	9
2.1.4. Sasaran	9
2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja	10
2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja	12
2.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran	13
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.7. Rencana Anggaran Tahun 2018	18
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Realisasi Anggaran	48
BAB IV. PENUTUP	51
LAMPIRAN. Lampiran	52

DAFTAR TABEL

Tabel.2.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab.Bone	11
Tabel.2.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	12
Tabel.2.4	Program Pencapaian Sasaran	14
Tabel.2.5	Perjajian Kinerja Sekretariat Daerah	16
Tabel.2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
Tabel.2.7	Rencana Belanja Sekretariat Daerah	18
Tabel.2.7.1	Alokasi Per Sasaran Anggaran Belanja Langsung	18
Tabel.3.1	Skala Pengukuran Ordinal	21
Tabel.3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	22
Tabel.3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 (Satu)	23
Tabel.3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 (Dua)	25
Tabel.3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 3 (Tiga)	26
Tabel.3.6	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 4 (Empat)	28
Tabel.3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 5 (Lima)	29
Tabel.3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 (Satu)	31
Tabel.3.9	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2 (Dua)	32
Tabel.3.10	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 3 (Tiga)	34
Tabel.3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 (Satu)	37
Tabel.3.12	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 2 (Dua)	38
Tabel.3.13	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3 (Tiga)	39
Tabel.3.14	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 4 (Empat)	40
Tabel.3.15	Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 1 (Satu)	42
Tabel.3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 (Satu)	46
Tabel.3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 (Dua)	46
Tabel.3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3 (Tiga)	47
Tabel.3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4 (Empat)	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1.	Lima Komoditas Dengan Kenaikan Indeks Harga Tertinggi	35
Grafik.2.	Lima Komoditas Dengan Penurunan Indeks Harga Tertinggi	35

DAFTAR LAMPIRAN

1	Peringkat I Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat kabupaten/kota Sulawesi Selatan tahun 2018
2	Juara II Kategori Keterbukaan Informasi publik se-sulawesi selatan 21 Desember 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi

instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, Laporan Kinerja (LKj) tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Sekretariat Daerah (Setda) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj SKPD Setda merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pembentukan Setda tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Setda diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

b. Fungsi Sekretariat Daerah:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah

c. Struktur Organisasi

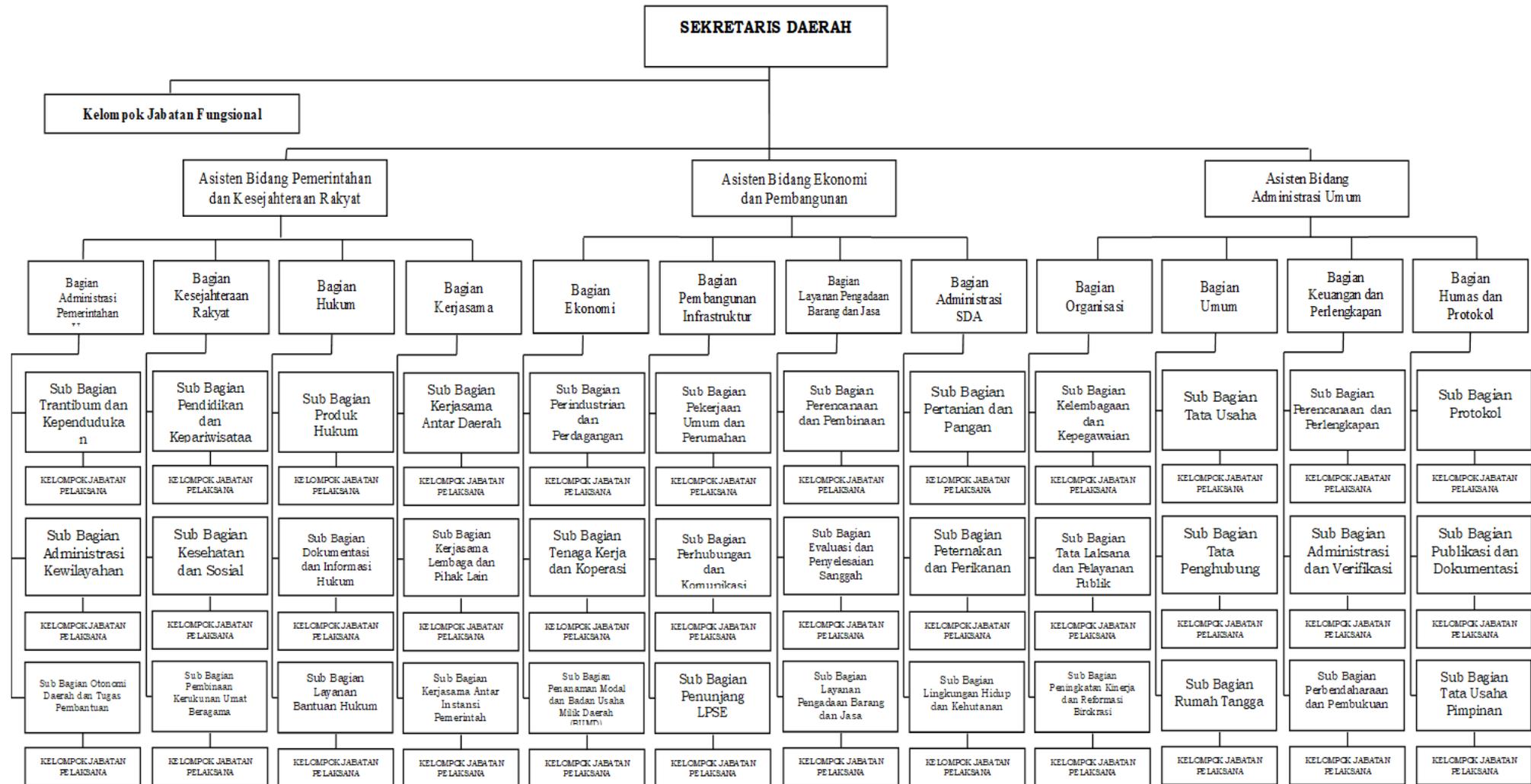
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Trantibun dan Kependudukan
 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pendidikan dan Kepariwisata
 2. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial
 3. Sub Bagian Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - c. Bagian Hukum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produk Hukum
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 3. Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum
 - d. Bagian Kerjasama terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah
 2. Sub Bagian Kerjasama Lembaga dan Pihak Lain
 3. Sub Bagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah
3. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Ekonomi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan

2. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Koperasi
3. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian Pembangunan Infrastruktur terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perumahan
 2. Sub Bagian Perhubungan dan Komunikasi
 3. Sub Bagian Penunjang LPSE
- c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sengkah
 3. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pertanian dan Pangan
 2. Sub Bagian Peternakan dan Perikanan
 3. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Asisten Bidan Administrasi terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi Terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
 3. Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Tata Penghubung
 3. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Administrasi dan Verifikasi
 3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
 - d. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 1. Sub Bagian Protokol
 2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Gambar 1 : Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



1.4 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan layanan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:
 - a. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa bagian dengan dinas/instansi lain;
 - b. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;
 - c. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kinerja
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur, permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yaitu:
 - a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
 - b. Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM aparatur.
 - c. Manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai belum optimal yg ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai di beberapa unit kerja lingkup Sekretariat Daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - a. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Publik;
 - b. Kurangnya Jiwa melayani untuk kepentingan publik;
4. Pemahaman Peraturan Perundang-undangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - a. Adanya Peraturan Per Undang-Undang yang saling tumpang tindih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah :

- a. Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan Umum, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat. dalam penyusunan kebijakan pimpinan yang terpadu, akurat dan akuntabel;
- b. Meningkatkan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Pembangunan Infrastruktur, Adminisrasi Sumber Daya Alam dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Meningkatkan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Terkait dengan Pengordinasian Bidang Organisasi, Umum , Humas dan Protokol, Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah secara efektif dan efisien.

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem

yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone periode 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Yang Profesional, Akomodatif, Responsif dan Akuntabel”**.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bone merumuskan Misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja penyediaan bahan, data dan rumusan kebijakan yang akurat, realitas dalam pengambilan kebijaksanaan pimpinan daerah

2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati dan SKPD.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian keuangan daerah, peralatan, organisasi, kepegawaian dan pelayanan administrasi
4. Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya serta partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan
5. Mengembangkan system informasi dan telekomunikasi secara terpadu yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan dalam mempromosikan daerah

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan Umum, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.

2.2. TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selanjutnya ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan Kerjasama;

Sasaran 2 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan.

Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang adminitrasi umum;

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Kinerja Setda

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Serta Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85	85
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	%	95	95
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	%	85	85
	Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	Kategori	(3,01- 4) = Sangat Tinggi	(3,01- 4) = Sangat Tinggi
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah	5	5
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	%	100	100
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85	85
	Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat	5	5
	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai	CC (50-60)	CC (50-60)
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Jumlah	1	1
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	C (30-50)	C (30-50)
	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	%	80	85
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	Nilai	C (50-50)	C (50-50)

2.3. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah Serta Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi

Sasaran :

1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.

Tujuan 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85	85
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	%	95	95
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	%	85	85

	Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	Kategori	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah	2	2
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	%	100	100
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber daya alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85	85
	Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat	5	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai	CC (50-60)	CC (50-60)
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Jumlah	1	1
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	C (30-50)	C (30-50)
	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	%	80	80
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIC	Nilai	C (50-50)	C (50-50)

2.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
	3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Lembaga dan Pihak Lain
	4 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	6 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	7 Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
	8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	1 Program Pengembangan Data/Informasi
	2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	6 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	7 Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan	1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	4	Program Pengembangan Data/Informasi	
	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	
	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	10	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rayat dan Kerjasama.	Persentase Policy Brief (Rumusan Kebijakan) Bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	%	95
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	%	85
	Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	Kategori	(3,01-4) = Sangat Tinggi
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	%	100
	Persentase Policy Brief (Rumusan Kebijakan) Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85
	Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai	CC (50-60)
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Jumlah	1
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	C (30-50)
	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	%	80
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	Nilai	C (50-60)

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Setda telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief (rumusan kebijakan) di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Bupati dibagi jumlah policy di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ada X 100 %	Dok. Policy Brief Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan berdasarkan prolegda dibagi Jumlah Produk Hukum X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan dibagi Jumlah Permasalahan Hukum yang ada X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negri	Dok. Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan	Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan di bagi Jumlah	Data Bagian Kerja Sama	Bagian Kerjama
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	Jumlah paket RUP yang diproses melalui ULP dan LPSE dibagi Jumlah paket RUP X 100%	Rekapitulasi pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Barang dan Jasa
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan yang dimanfaatkan	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Dok. Policy Brief Bidang Pembangunan dan ASDA	Bagian Pembangunan dan Bagian ASDA
	Tingkat Inflasi Daerah	Hasil Survey BPS Kab. Bone	Dok. BPS dan Bagian Ekonomi Kab. Bone	Bagian Ekonomi
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP oleh Kemenpan/Tim	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP	Bagian Organisasi
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Hasil Penilaian Inovasi	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian	Bagian Organisasi
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kab. Bone	Dok. Hasil Survey SKM pada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	Jumlah Kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan pada tahun (n) dibagi jumlah kebijakan pemerintah daerah yang ada pada tahun (n) X 100%	Dok. Hasil Kebijakan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	Bagian Humas dan Protokol

2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 46.879.723.504,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Rencana Belanja Sekretariat Daerah TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	7.909.723.504,00	16,9
2	Belanja Langsung	38.970.000.000,00	83,1
Jumlah		46.879.723.504,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN	
1	2	4	5	6	
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rayat dan Kerjasama.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
		1 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Tim Penerima UKS	136.491.000,00	0,35	
			Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan		
			1 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	957.344.000,00	2,46
			2 Pembinaan Kehidupan Beragama	689.265.000,00	1,77
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
			1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	219.515.000,00	0,56
			2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	270.485.000,00	0,69
			3 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	128.200.000,00	0,33
			4 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	392.500.000,00	1,01
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	644.800.000,00	1,65
			Program Pendidikan Politik Masyarakat		
			1 DESK Pilkada	186.782.500,00	0,48
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
			1 Bimbingan Teknis Administrasi Pemerintahan	103.505.000,00	0,27
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
			1 Penyusunan LKPJ dan LPPD	422.108.000,00	1,08
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
			1 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	142.646.000,00	0,37
			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		
		1 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan	236.743.000,00	0,61	
		Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah			
		1 Administrasi PAW DPRD	27.580.500,00	0,07	
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			
		1 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	119.870.000,00	0,31	
		2 Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	136.700.000,00	0,35	
		3 pembentukan Kerjasama Antar Daerah	172.640.000,00	0,44	
JUMLAH ANGGARAN SASARAN 1			4.987.175.000,00	12,80	

Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Program Pengembangan Data/Informasi			
		1 Penyediaan Jasa Pelelangan Barang dan Jasa	507.000.000,00	1,30	
		2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	317.000.000,00	0,81	
Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber daya alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
		1 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	200.965.500,00	0,52	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
	1 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	351.984.500,00	0,90		
	Program peningkatan administrasi sumber daya alam				
	1 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	133.000.000,00	0,34		
	2 Sosialisasi Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	115.000.000,00	0,30		
	3 Rapat Koordinasi antar instansi terkait pengelolaan sumber daya alam	152.000.000,00	0,39		
	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Program Pengembangan Data/Informasi		
			1 Penyusunan Dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	137.790.000,00	0,35
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
			1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	378.529.000,00	0,97
			2 Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pelaporan Tim Inflasi Daerah	250.000.000,00	0,64
			3 Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Rokok Ilegal	100.000.000,00	0,26
			4 Percepatan Akses Keuangan Daerah	150.000.000,00	0,38
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan			421.471.000,00	1,08	
2 Sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah			200.000.000,00	0,51	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					
JUMLAH ANGGARAN SASARAN 1			3.660.740.000,00	9,39	
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Cukai	100.000.000,00	0,26	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	215.665.000,00	0,55	
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda		
			1 Penataan Kelembagaan	126.604.000,00	0,32
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		
			1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns	193.833.000,00	0,50
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		
			1 Perumusan Kebijakan Kepala Daerah	62.550.000,00	0,16
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
			1 Monitoring evaluasi dan pelaporan	111.206.000,00	0,29
			2 Pembinaan SKPD dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	258.642.000,00	0,66
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
			1 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	645.000.000,00	1,66
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	160.000.000,00	0,41		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1 Bimbingan Teknis	34.000.000,00	0,09		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	189.225.000,00	0,49		
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				
	1 Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat	513.000.000,00	1,32		
	2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	681.300.000,00	1,75		
	3 Rapat Koordinasi Unsur Muspida	30.000.000,00	0,08		
	4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	302.500.000,00	0,78		
	5 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	201.290.000,00	0,52		
	6 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	506.000.000,00	1,30		
	7 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	45.000.000,00	0,12		
	8 Pemantapan pengaturan acara / kegiatan Humas dan Protokol	1.831.130.000,00	4,70		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	1 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	870.000.000,00	2,23		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				
	1 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	1.646.916.500,00	4,23		
Program Pengembangan Data/Informasi					
1 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan	157.000.000,00	0,40			
JUMLAH ANGGARAN SASARAN 1			8.880.861.500,00	22,79	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	80.000.000,00	0,21
		2 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	523.986.500,00	1,34
		3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	687.010.000,00	1,76
		4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	671.249.500,00	1,72
		5 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.630.000.000,00	4,18
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	5.008.642.500,00	12,85
		2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	938.225.000,00	2,41
		3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	850.600.000,00	2,18
		4 Pengadaan Mebeleur	720.100.000,00	1,85
		5 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	1.163.210.000,00	2,98
		6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	280.000.000,00	0,72
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.000.000,00	0,43
		2 Penelitian dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban	193.975.000,00	0,50
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
		1 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	337.100.000,00	0,87
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda		
		1 Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	395.000.000,00	1,01
		2 Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	395.000.000,00	1,01
		3 Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian	395.000.000,00	1,01
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	307.610.000,00	0,79
		2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	405.100.000,00	1,04
		3 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	400.000.000,00	1,03
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
		1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	375.000.000,00	0,96
		2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	740.625.000,00	1,90
		3 Pemeliharaan gedung dan peralatan Mess Pemda	940.800.000,00	2,41
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	0,09
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		
1 Pemantapan pengaturan acara / kegiatan Umum dan Rumah Tangga	3.801.990.000,00	9,76		
JUMLAH ANGGARAN SASARAN 1			21.441.223.500,00	55,02

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.38.970.000.000,00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 4 dengan besaran 55,02%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 3 yaitu sebesar 22,79%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 2 sebesar 9,39% % dan sasaran 1 sebesar 12,80 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat empat (4) sasaran dengan tiga belas (13) indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat lima (5) indikator sasaran, Sasaran 2 terdapat tiga (3) indikator sasaran, Sasaran tiga (3) terdapat empat (4) indikator sasaran dan Sasaran 4 terdapat satu (1) indikator sasaran

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
			BS	B	SK
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	5	BS = 5	B = -	SK = -
			C = -	K = -	
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	3	BS = 1	B = 2	SK = -
			C = -	K = -	
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	4	BS = 2	B = 1	SK = -
			C = -	K = 1	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	BS = -	B = -	SK = -
			C = 1	K = -	

Dari Hasil penjelasan tabel diatas, analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 13 (tiga belas) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 8 Indikator Sasaran Baik Sekali atau 61,54%, 3 Indikator Sasaran Baik atau 23,08%, satu Indikator sasaran cukup atau 7,69 % dan satu indikator sasaran kurang atau 7,69% Rata-rata realisasi capaian indikator kinerja yang mencapai target 84.62 % atau bermakna Baik Dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018 pada kategori Baik.

Selanjutnya analisis pencapaian masing-masing indikator sasaran menurut kelompok sasaran sebagai berikut :

A. Sasaran 1 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.

1. *Persentase policy brief (rumusan kebijakan) bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Perangkat Daerah.*

Tabel. 3.3
Persentase policy brief (rumusan kebijakan) bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Perangkat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	Persentase policy brief (rumusan kebijakan) bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	85	100	85	80

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Persentase policy brief (rumusan kebijakan) bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan dengan capaian **melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 dengan persentase 100% dari target 2 policy brief atau sekitar 85%, capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**. Pada tahun 2018 jumlah rumusan kebijakan yang dimanfaatkan ada 3 policy brief (rumusan kebijakan) dari 3 policy brief (rumusan kebijakan) yang ada yaitu :

1. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Bone
2. Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama
3. Pedoman Pengelolaan Jamaah Haji.

$$\frac{\text{Jumlah Policy Brief Yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Seluruh Policy Brief yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan target pada indikator kinerja utama tentang Persentase policy brief (rumusan kebijakan) bidang Kesejahteraan Rakyat disebabkan oleh :

1. Banyaknya jumlah Kecamatan yang ikut melaksanakan UKS yaitu sebanyak 27 Kecamatan, dalam upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat untuk membentuk perilaku hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang baik sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi-tingginya.
2. Pembinaan kehidupan beragama melalui hari-hari besar keagamaan berhasil dilaksanakan sebanyak 8 hari besar keagamaan, sehingga kerukunan kehidupan beragama di Kabupaten Bone semakin baik, ditandai dengan tingginya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bone yang menganut empat agama yaitu : Agama Islam, Keristen, Budha dan Hindu.
3. Pelaksanaan pedoman pengelolaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji di Kabupaten Bone semakin baik di tandai dengan jumlah jamaah yang berhasil diberangkatkan dan di pulangkan setiap tahun selalu bertambah yang pada tahun 2018 jamaah haji yang difasilitasi sebanyak 761 orang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	960.644.000,-	960.196.000,-	99%
	Rapat Koordinasi Tingkat Tim Pembina UKS	150.991.000,-	148.990.000,-	98%
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Kehidupan Beragama	704.365.000,-	701.790.000,-	98%

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung dua program dan tiga kegiatan adalah 99,4 %

2. *Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda.*

Tabel 3.4

Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan berdasarkan Prolegda.	%	95	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan berdasarkan Prolegda dengan capaian telah **melebihi target** yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100% dari target yaitu 95%. Pada tahun 2018 jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Prolegda ada enam (6) Peraturan daerah, dari target yang ditetapkan yaitu lima (5) produk hukum daerah. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**.

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan berdasarkan Prolegda}}{\text{Jumlah keseluruhan produk hukum yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan indikator kinerja utama ini disebabkan adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sehingga mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	219.515.000,00	215.605.000,00	98.22
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270.485.000,00	260.855.000,00	96.44
	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	128.200.000,00	119.579.002,00	93.28
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Per-Undang-Undangan	392.500.000,00	368.621.452,00	93.92

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung satu program dan empat kegiatan adalah 95,46 %

3. *Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan.*

Tabel 3.5.

Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	Persentase Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	%	85	100	70	80

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Permasalahan Hukum yang Diselesaikan dengan capaian telah **melebihi target** yang telah ditetapkan yaitu 85% pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2018 permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan yaitu 238 temuan dari jumlah keseluruhan kasus temuan yang ada yakni 238, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 dengan capaian 70%, maka capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**.

Keberhasilan indikator kinerja utama ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan sebanyak 238 kasus sehingga menghasilkan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018.

$$\frac{\text{Jumlah Permasalahan hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah keseluruhan hukum yang ditangani}} \times 100 \%$$

$$\frac{238 \text{ Kasus}}{238 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	644.800.000,00	542.940.000,00	84.20

4. Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten

Tabel 3.6.

Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	Kategori Penilaian Nasional Hasil LPPD	Kategori	Sangat Tinggi = (3,01-4)	Sangat Tinggi = (3,4963)	Sangat Tinggi = (3,1766)	Sangat Tinggi = (3,1391)

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Kategori Penilaian Nasional Hasil LPPD dengan capaian kinerja **mencapai target** yang telah ditetapkan yaitu kategori **Sangat Tinggi=(3,01-4)**. Pada tahun 2018 hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masuk peringkat sepuluh (10) besar Nasional dengan skor 3.4963 dengan kategori **sangat tinggi** sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)** jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu peringkat 69 Nasional dengan skor 3.1766 dan tahun 2016 peringkat 59 Nasional dengan skor 3.1391.

Keberhasilan indikator kinerja utama ini disebabkan oleh sinergi organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Bone, adanya komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD dalam memberikan data secara valid, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik serta kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya. Selain itu peringkat LPPD juga sangat dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan Kabupaten Bone, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pemerintah daerah mampu melahirkan berbagai inovasi yang menjadi salah satu komponem pendukung dalam penilaian.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Desk Pilkada	186.782.500,00	186.782.500,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Administrasi Pemerintahan	103.505.000,00	102.755.000,00	99.28
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Penyusunan Lkpd Dan Lppd	422.108.000,00	415.390.671,00	98.41

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung tiga program dan tiga kegiatan adalah 99.25 %

5. Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan

Tabel.3.7.

Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	Jumlah MOU/PKS yang dilaksanakan	Jumlah	5	9	15	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Jumlah MOU/PKS yang dilaksanakan bahwa capaian keinerja telah **melebihi target** yang telah ditetapkan yaitu lima (5) MOU/PKS. Pada tahun 2018 jumlah MOU/PKS yang berhasil disepakati dan dilaksanakan ada Sembilan MOU/PKS. Kondisi capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**

Keberhasilan ini disebabkan oleh pengkoordinasian persiapan kerja sama daerah yang dilaksanakan, dengan terlebih dahulu memperhatikan kapasitas unit yang melaksanakan atau SKPD yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama daerah untuk meminimalisir terjadinya perjanjian kerja sama yang tidak ditindaklanjuti. Ketatalaksanaan dalam menilai persiapan kerja sama daerah dan pelaksanaan kerja sama daerah menjadi hal utama dalam menilai dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. dengan melihat berbagai dimensi dalam tahapan pelaksanaan persiapan, penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama	119.870.000,00	117.188.100,00	97.67
	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Luar Negeri	136.700.000,00	136.240.000,00	99.66
	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	172.640.000,00	162.390.600,00	94.06

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung satu program dan tiga kegiatan adalah 98,00 %

B. Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

1. *Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement).*

Tabek. 3.8.

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement).

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	%	100	99,26	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement) mencapai **target** yang telah ditetapkan. Realisasi paket pengadaan secara elektronik pada tahun 2018 yaitu 135 paket dari target 136 paket yang ada. Kondisi capaian ini dikategorikan **Baik (B)**

$$\frac{\text{Jumlah Paket Pengadaan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\% = \frac{135}{136} \times 100\% = 99,26\%$$

Ketidakberhasilan ini karan adanya satu paket pengadaan yang tidak berhasil dilaksanakan, namun demikian capaian indikator ini masih di kategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Pengembangan Data/Informasi	Penyediaan Jasa Pelelangan Barang Dan Jasa	507.000.000,00	490.410.358,00	96.73
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	317.000.000,00	302.101.102.	95.30
	Penyusunan Penyediaan Barang Dan Jasa	246.000.000,00	234.543.711,00	95.34

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung satu program dan tiga kegiatan adalah 98,00 %

2. *Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah*

Tabel .3.9.

Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	85	100	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah dengan capaian telah **melebihi target** yang telah ditetapkan yaitu 9 Kecamatan. Pada tahun 2018 yang mengikuti dan melaksanakan regulasi pengelolaan sumber daya alam 9 Kecamatan. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**

$$\frac{\text{Jumlah Policy Brief Yang Dimanfaatkan Bupati}}{\text{Jumlah Seluruh Policy Brief yang ada}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Keberhasilan indikator kinerja utama ini disebabkan telah dilaksanakannya sosialisasi yang menghadirkan peserta sebanyak 200 orang dari 27 Kecamatan yang di tindak lanjuti dengan sepuluh kali rapat koordinasi.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	200.965.500,00	176.848.084,00	88.00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	351.984.500,00	319.095.026,00	90.66
Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	133,000,000	124,160,000	93.35
	Sosialisasi Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	115,000,000	108,849,900	94.65
	Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	152,000,000	141,861,600	93.33

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung tiga program dan lima kegiatan adalah 93,81 %

3. Tingkat Inflasi Daerah

Tabel.3.10.
Tingkat Inflasi Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat	5	4,6	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Tingkat Inflasi Daerah dengan capaian **melebihi target** yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 4,6 persen. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**

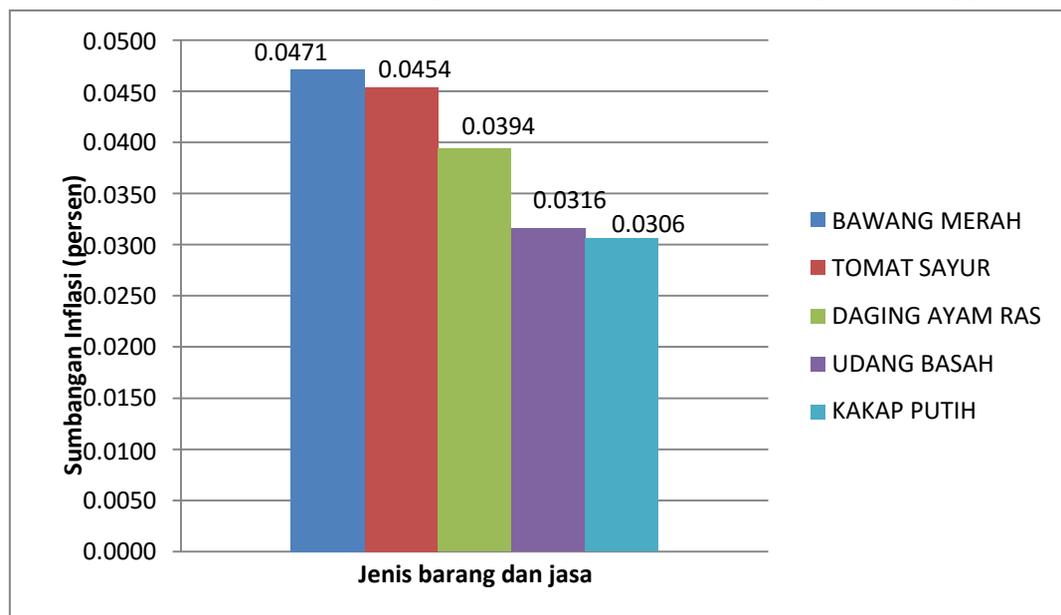
Keberhasilan ini disebabkan pada bulan Desember 2018, Kota Watampone mengalami inflasi (kenaikan harga) sebesar 0,21 persen. Kenaikan tersebut menyebabkan laju Inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2018) sebesar 4,69 persen. Begitu pula dengan laju Inflasi "year on year" (Desember 2018 terhadap Desember 2017) di Kota Watampone sebesar 4,69 persen.

Inflasi di Kabupaten Bone terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok barang dan jasa terutama dari kelompok bahan makanan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

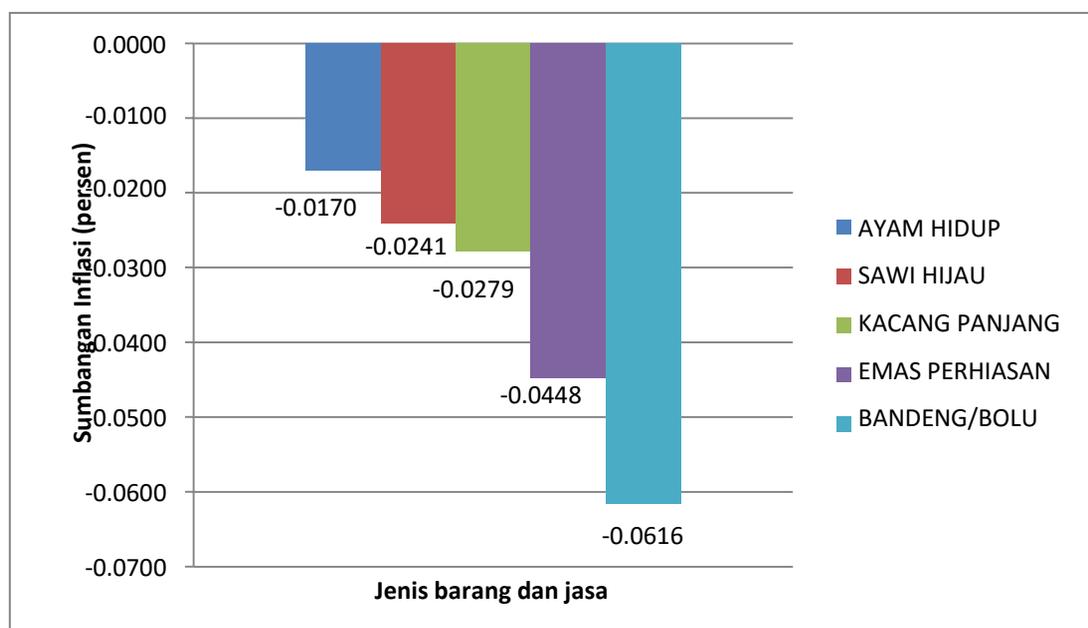
Inflasi yang terjadi terutama disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,09 persen; dan kelompok bahan makanan sebesar 0,84 persen. Sementara untuk kelompok barang yang mengalami penurunan indeksa harga/deflasi, yaitu kelompok sandang sebesar 0,45 persen.

Penyumbang terbesar nilai inflasi pada bulan Desember adalah kelompok komoditas kacang-kacangan, bumbu bumbu dan sayur-sayuran. Lima komoditas dengan kenaikan indeks harga tertinggi selama bulan Desember, yaitu bawang merah, tomat sayur, daging ayam ras, udang basah, dan kakap putih. Sementara lima komoditas dengan penurunan indeks harga tertinggi selama bulan Desember, yaitu bandeng/bolu, emas perhiasan, kacang panjang, sawi hijau, dan ayam hidup. Besar kenaikan/penurunannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.
Lima Komoditas dengan Kenaikan Indeks Harga Tertinggi



Grafik 2.
Lima Komoditas dengan Penurunan Indeks Harga Tertinggi



Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Pengembangan Data / Informasi	Penyusunan Dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	137.790.000,00	133.240.000,00	96.70
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	378.529.000,00	369.429.000,00	97.60
	Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Dan Pelaporan Tim Inflasi Daerah	250.000.000,00	248.250.000,00	99.30
	Pengumpulan Data Dan Formasi Peredaran Rokok Illegal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Percepatan Akses Keuangan Daerah	150.000.000,00	149.950.000,00	99.97
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	421.471.000,00	421.471.000,00	100
	Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	200.000.000,00	199.998.000,00	99.99
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bea Cukai	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung empat program dan delapan kegiatan adalah 98,47 %

C. Sasaran 3 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.

1. Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten.

Tabel.3.11.

Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai	CC (50-50)	CC (50-50)	C (30-14)	C (30-14)

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten telah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu Nilai = CC-(50-50) pada tahun 2018 berdasarkan Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1238/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bone mendapat **nilai 50,50** atau dengan **predikat penilaian “CC”** Kondisi capain ini di kotegorikan **Baik (B)** karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 dan bila di bandingkan dengan hasil capaian dua tahun sebelumnya telah mengalami perbaikan dan peningkatan dimana pada tahun 2017 dan 2016 hasil penilaian yang di peroleh yaitu **30,14** atau predikat penilaian **“C”**.

Rekomendasi hasil penilaian evaluasi yang diberikan akan menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah di masa yang akan datang sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Periode 2018-2023.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	215.665.000,00	213.159.219,00	98.84

2. Jumlah inovasi yang mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah

Tabel.3.12.

Jumlah inovasi yang mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum	Jumlah inovasi yang mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah	Jumlah	1	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Jumlah Inovasi yang mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Inovasi yang dikembangkan PKK Kecamatan Barebbo yaitu koper ASI-Eklusif baru masuk top 30 besar JIPP Sulawesi Selatan, kondisi capaian kinerja ini di kategorikan **Sangat Kurang**.

Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai penyusunan proposal inovasi pelayanan public untuk diikuti lomba sinovik pada Kemenpan RB tahun 2018

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Dan Kelembagaan Pemda	Penataan Kelembagaan	126.000.000,00	125.620.358,00	99.22

3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tabel.3.13.
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	C (30-50)	B (60-70)	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah **melebihi target** yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Survey Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai **B = (70-80)**. Capaian indikator ini dikategorikan **Baik Sekali (BS)**

Keberhasilan ini disebabkan oleh instansi pelayanan public yang telah melakukan survey Kepuasan public DPMPSTSP dengan nilai 78 kategori Baik. Untuk kedepannya diharapkan semua instansi pelayanan dapat melakukan survey terhadap jenis pelayanan ublik pada SKPD masing-masing

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	111.206.000,00	108.485.090,00	97.55
	Pembinaan Skpd Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	258.642.000,00	254.079.629,00	98.24

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung satu program dan dua kegiatan adalah 97,79 %

4. Persentase Kebijakan Pemerintah yang Terpublikasi

Tabel.3.14.

Persentase Kebijakan Pemerintah yang Terpublikasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum	Persentase Kebijakan Pemerintah Yang Terpublikasi	%	100	100	98	99

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Kebijakan Pemerintah Yang Terpublikasi **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 sebanyak 308 publikasi capaian ini dikategorikan **Baik (B)**

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Pemerintah Yang Terpublikasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kebijakan Pemerintah}} \times 100 \%$$

$$\frac{308}{308} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasil ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Bone dengan berbagai media.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	645.000.000,00	494.992.000,00	76.74
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	160.000.000,00	155.300.000,00	97.06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis	34.000.000,00	34.000.000,00	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	189.225.000,00	188.396.485,00	99.56
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH /WKDH	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi	513.000.000,00	503.037.000,00	98.06
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah	681.300.000,00	645.202.500,00	94.70
	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	30.000.000,00	30.000.000,00	100
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	302.000.000,00	282.716.000,00	93.46
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	201.290.000,00	133.501.052,00	66.32
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	506.000.000,00	456.474.044,00	90.21
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati Dan Wakil Bupati	45.000.000,00	-	-

	Pemantapan Pengaturan Acara / Kegiatan Humas Dan Protokol	1.831.130.000,0 0	1.818.830.590,0 0	99.33
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Kdh	870.000.000,00	860.045.488,00	98.86
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi	1.646.916.500,00	1.634.594.430,00	99.25

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung tujuh program dan empat belas kegiatan adalah 94,59%

D. Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel.3.15.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	Nilai	CC (50-60)	C (30-50)	C (30-14)	C (30-14)

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Nilai SAKIP Oleh APIP tidak **mencapai target** yang telah ditetapkan yaitu CC = (50-60) pada tahun 2018. Kondisi capaian ini di kategorikan **kurang** dengan nilai **30,50**. bila di bandingkan dengan hasil capaian dua tahun sebelumnya tidak mengalami perbaikan atau peningkatan dimana pada tahun 2017 dan 2016 hasil penilaian yang di peroleh yaitu **30,14**. Rekomendasi hasil penilaian evaluasi yang diberikan akan menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik khususnya pada Sekretariat Daerah di masa yang datang sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Periode Tahun 2018-2023.

Permasalahan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kinerja
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai belum optimal yg ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai di beberapa unit kerja lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	307.610.000,-	287.677.602,-	93,52
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	405.100.000,-	391.162.900,-	96,56
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000,-	399.995.800,-	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	405.100.000,-	391.162.900,-	96,56
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	523.986.500,-	513.864.846,-	98,07
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	687.010.000,-	665.774.784,-	96,91
	Penyediaan Komponen Instalasi	671.249.500,-	671.101.500,-	99,98

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.630.000.000,-	1.629.715.500,-	99,98
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	5.008.642.500,-	4.999.007.500,-	99,81
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	938.225.000,-	938.027.000,-	99,98
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	850.600.000,-	850.100.000,-	99,94
	Pengadaan Mebeleur	720.100.000,-	719.800.000,-	99,96
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	645.000.000,-	494.992.000,-	76,74
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	375.000.000,-	374.663.189,-	99,91
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	166.000.000,00	165.749.000,00
Penelitian Dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban		193.975.000,00	193.256.950,00	99,63
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	337.100.000,00	335.675.000,00	99,58
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Dan Kelembagaan Pemda	Pembinaan Dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	395.000.000,00	394.999.400,00	100,00
	Pembinaan Dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	395.000.000,00	394.884.600,00	99,97
	Pembinaan Dan Koordinasi Administrasi Umum Dan Kepegawaian	395.000.000,00	394.809.000,00	99,95

Program Pengembangan Data / Informasi	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	157.000.000,00	154.837.000,00	98,62
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	375.000.000,00	374.663.189,00	99,91
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	740.625.000,00	733.920.744,00	99,09
	Pemeliharaan Gedung Dan Peralatan Mess Pemda	940.800.000,00	889.953.451,00	94,60
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	35.000.000,00	30.147.400,00	86,14
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Pemantapan Pengaturan Acara / Kegiatan Umum Dan Rumah Tangga	3.801.990.000,00	3.786.381.000,00	99,59

Rata-rata realisasi anggaran pada indikator ini yang didukung sembilan program dan dua puluh enam kegiatan adalah 86,29 %

A. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rata-rata realisasi capaian indikator kinerja yang mencapai target 84.62 % atau bermakna Baik dengan demikian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018 pada kategori Baik, banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Perbandingan capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran terkait dengan efisiensi sumber daya untuk masing-masing sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau melebihi target dapat dijelaskan dalam berikut :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	117	99.4	17.6
		Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	105	95.46	9.54
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	117	84.2	32.8
		Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	100	99.25	0.75
		Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	180	98	82
Rata-Rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1			132.33	93.82	38.52

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	100	98	2
		Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber daya alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	116.47	93.81	22.66
		Tingkat Inflasi Daerah	108.7	98.47	10.23
Rata-Rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2			108.39	96.76	11.63

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	100	98.84	1.16
		Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	0	99.22	-99.22
		Survey Kepuasan Masyarakat	100	97.79	2.21
		Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	100	94.59	5.41
Rata-Rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3			100.00	130.15	-30.15

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	65	86,29	-21,29

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran pada sasaran ini menunjukkan tingkat efisiensi masih sangat rendah, hal ini akan menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik khususnya pada Sekretariat Daerah di masa yang datang sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Periode Tahun 2018-2023.

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.45.310.337.295,00 atau sekitar (96,65%) dari Total Anggaran sebesar Rp.46.879.723.504,00

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.306.204.513,-(92,36%)
- Belanja Langsung	Rp. 38.004.132.782,-(97,52%)
Jumlah	Rp.45.310.337.295,-(96,65%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Sekretariat Daerah terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Sekretariat Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.306.204.513,00 atau 92,36% yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.474.289.743,00
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 831.914.770,00

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.38.004.132.782,00 atau sekitar 97,52% dari total anggaran sebesar Rp. 38.970.000.000,00 dengan jumlah 24 program dan 79 kegiatan.

3. Penghargaan Yang Diterima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018 telah menerima penghargaan sebagai berikut:

1. Peringkat I Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat kabupaten/kota Sulawesi Selatan Tahun 2018
2. Juara II Kategori Keterbukaan Informasi Publik se-sulawesi selatan, 21 Desember 2018

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kinerja
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai belum optimal yg ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai di beberapa unit kerja lingkup Sekretariat Daerah.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Bone adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan solusi memperbaiki strategi dan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah di masa yang akan datang sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dengan optimalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah.
2. Mengembangkan budaya kerja yang disiplin, konsultatif, koordinasi dan kebersamaan tanggungjawab sebagai tim work.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
5. Melaksanakan analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan;
6. Meningkatkan Pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi;
7. Meningkatkan manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai yang belum optimal sehingga komposisi jumlah pegawai di beberapa unit kerja lingkup Sekretariat Daerah memenuhi tuntutan tugas dan sesuai dengan beban kerja;
8. Meningkatkan kualitas dokumen pendukung SAKIP (Renja, Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja);
9. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja;
10. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimtek dan pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Sekretariat Daerah juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 7 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 4 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Bagi instansi di lingkungan Sekretariat Daerah sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Watampone, 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

H.A. SURYA DARMA, SE., M.Si
PangkatARP Pembina Utama Madya
Nip.19600424 198702 1 004